

**EFEKTIFITAS PROGRAM PENGUATAN MODAL  
MASYARAKAT UNTUK PENGEMBANGAN LUMBUNG  
TERNAK NAGARI DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Oleh:*

**SRI ARYATI**  
**BP: 02 164 052**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program  
Studi Sosial Ekonomi Fakultas peternakan*



**FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2006**

**EFEKTIFITAS PROGRAM PENGUATAN MODAL MASYARAKAT  
UNTUK PENGEMBANGAN LUMBUNG TERNAK NAGARI  
DI KOTA PADANG**

Sri Aryati, di bawah bimbingan

Dr. Ir. Asdi Agustar M.Sc dan Ir Basril Basyar, MM

Jurusan Produksi Peternakan Program Studi Sosial Ekonomi Peternakan

Fakultas Peternakan

Universitas Andalas Padang 2006

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program Penguatan Modal Masyarakat di Kota Padang berjalan secara efektif dan untuk mengetahui bagaimana implementasinya. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus artinya seluruh populasi dijadikan responden. Cara ini dipakai karena jumlah dari populasi yang relatif kecil yaitu sebanyak 30 orang. Responden dari penelitian ini adalah seluruh peternak penerima bantuan dana dari program penguatan modal masyarakat di Kota Padang.

Data diolah dengan analisa deskriptif seperti persentase. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari program ini sudah berjalan dengan baik karena ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan hampir sepenuhnya. Program Penguatan Modal Masyarakat ini belum memberikan indikasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena peningkatan dari ketiga indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat relatif kecil.

Kata Kunci: Implementasi, Efektifitas, Sensus

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bertitik tolak dari pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah maka terjadi pula perubahan paradigma pembangunan di daerah yang lebih menitik beratkan pada upaya pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Disini terlihat bahwa masyarakat merupakan subyek dari pembangunan, mereka yang menentukan yang terbaik untuk dilaksanakan di daerahnya sekaligus mereka juga yang menilai hasil pembangunan tersebut sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator.

Dalam upaya mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Sumatera Barat telah menyusun suatu kebijaksanaan dimana Pembangunan Daerah diarahkan kepada:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan
3. Penataan pemerintahan/kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu pilar dalam pola dasar pembangunan Sumatera Barat sebagai cerminan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya bila dilihat dari kondisi pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat dewasa ini permasalahan yang dihadapi lebih banyak terletak pada penyediaan modal usaha untuk meningkatkan nilai tambah produksi dan pengembangan usaha yang dilaksanakan.

Pemerintah dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan melalui Direktorat Jendral Peternakan sudah banyak melakukan upaya untuk pemberdayaan petani ternak diantaranya dengan pemberian bibit unggul, pemberian fasilitas kredit misalnya bantuan penguatan modal, inpres desa tertinggal dan lain sebagainya. Salah satu bantuan yang diberikan pemerintah yaitu bantuan kredit dalam bentuk bantuan penguatan modal guna meningkatkan pendapatan petani ternak dalam pengembangan skala usaha peternakan yang pada umumnya masih berupa usaha sampingan menjadi usaha pokok petani ternak.

Selanjutnya bila dilihat kondisi pengembangan ekonomi kerakyatan di Sumatera Barat, dewasa ini permasalahan yang dihadapi lebih banyak terletak pada penyediaan modal usaha untuk meningkatkan nilai tambah produksi dan pengembangan usaha yang dilaksanakan.

Semenjak tahun 2000 di Sumatera Barat telah disusun dan dilaksanakan pola pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui program Penguatan Modal Masyarakat untuk Pengembangan Lumbung Ternak Nagari dengan memberikan kredit modal kerja pada usaha peternakan. Kata "Nagari" pada program ini dipakai untuk memberikan ciri khas bahwa program ini dilaksanakan di Minangkabau karena istilah "Nagari" hanya ada di Sumatera Barat. Program ini didukung dengan bantuan dana dari APBD Propinsi Sumatera Barat.

Program Penguatan Modal Masyarakat ditujukan untuk mendorong gerakan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan usaha yang mempunyai potensi, mempunyai prospek bagus dalam kegiatan ekonomi secara luas serta diharapkan nantinya akan tercipta usaha peternakan mandiri juga pengembangan kawasan sentra industri dalam menunjang pusat perekonomian daerah.

Tahun 2001 Dinas Peternakan Sumatera Barat telah merealisasikan dana bantuan melalui program Penguatan Modal Masyarakat. Untuk Kota Padang jumlah peternak sapi potong yang mencalonkan diri sebanyak 97 orang dan yang lulus seleksi baik administrasi maupun teknis yaitu sebanyak 30 orang. Dana yang dikucurkan untuk peternak sapi potong di Kota Padang tersebut adalah sebesar Rp360.000.000,00 dengan plafond masing-masing peternak yaitu sebesar Rp12.000.000,00. Dana ini berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat

Sasaran dari program ini adalah pelaku usaha kecil yaitu petani ternak yang berada pada kawasan pengembangan komoditi unggulan dalam suatu daerah dan diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian masyarakat serta pendapatan daerah yang bersangkutan.

Adapun Tujuan dari program Penguatan Modal Masyarakat ini, adalah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani ternak dalam mengakses permodalan dan kegiatan ekonomi produktif.

Untuk melihat keefektifan dari program ini dan bertitik tolak dari gambaran di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul: **"Efektifitas Program Penguatan Modal Masyarakat untuk Pengembangan Lumbung Ternak Nagari dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Padang"**

## **1.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah implementasi program Penguatan Modal Masyarakat di Kota Padang
- b. Apakah program Penguatan Modal Masyarakat memberikan indikasi terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi dari program ini sudah berjalan dengan baik karena ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan hampir sepenuhnya, baik dari karakteristik peternak, proses yang dilalui peternak untuk mendapatkan bantuan dana maupun mekanisme yang dijalankan oleh tim pengelola dana bergulir pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Program Penguatan Modal Masyarakat ini belum memberikan indikasi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dari tiga indikator pemberdayaan, peningkatan dari tiga indikator tersebut relatif kecil. Maka program ini dapat dikatakan belum efektif karena tujuan yang ditetapkan belum tercapai.

### B. Saran

Ada beberapa saran yang timbul dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Peternak yang menunggak sebaiknya diberi sanksi agar dapat melunasi hutangnya jika tidak, hal ini akan dapat menghambat pemberian bantuan untuk peternak lain yang membutuhkannya karena bantuan ini merupakan bantuan dana bergulir.
2. Untuk pemberian bantuan dana berikutnya, diharapkan peternak yang menerima melalui tahapan seleksi yang seharusnya atau yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2002. *Kiat Praktis Mengatasi Permasalahan Peternakan Sapi potong*. Agro Media Pustaka, Jakarta
- Ardiwilaga. 1982. Ilmu Usaha Tani. Alumni Bandung
- Baswir, R. 1997. tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Artikel. Media Dakwah Edisi Desember. Pustaka Pelayan dan IDEA, Yogyakarta
- Biro Hukum Sekretariat daerah Propinsi Sumatera Barat. 2000. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemertintahan Nagari
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. 2005. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modal Masyarakat Melalui Modal Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Padang
- Direktur Jendral Peternakan. 1998. Kajian Pola Pengembangan Peternakan Rakyat Berwawasan Agribisnis. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Direktur Jendral Peternakan. 2002. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Panca Usaha Ternak Potong. Proyek Panca Usaha Ternak Potong Padang
- Direktur Jendral Peternakan. 2004. Laporan Pelaksanaan Dana Bergulir Kredit Modal Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Padang
- Gibson, dan Donelly. 1996. *Organisasi: Pelaku, Struktur, Proses*. Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Hamid, Helfian. 2005. Pemberdayaan Ekonomo Masyarakat di Wilayah Pedeseaan Sekitar Hutan melalui Usaha Peternakan Sapi Potong. Tesis Program Pasca Sarjana Unand, Padang
- Irawan. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi V, BPFE, Yogyakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1995. Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah tinjauan ADM. Malang
- Kartasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertimbangan dan Pemerataan*. PT Pustaka Cidensido, Jakarta.
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 45 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari.
- Guci, Masniarni. 2005. Analisa Modal Kredit Kerja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kota Padang. Universitas Andalas. Padang
- Moeljarto, Vidhyandika. 1996. Pemberdayaan Kelompok miskin Dalam Priyono, S. CNNY cet. Al, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CISS